



Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional

Suci Trianjani¹, Dara Aulia Yuman², Arta Nanda Kamila³, Yasinta Diva Negara⁴, Syakira Nazla Rifat Junaedi⁵, Farah Fasya⁶, Kayana Deeva Canthiqa⁷, Muhammad Fairuz⁸, Muhammad Rasyid Fasya Rizkiyansyah⁹, Ananda Rafli Prabowo¹⁰

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Received:	2 Oktober 2024	Abstract <i>Selama beberapa waktu, politik luar negeri Indonesia telah dikenal dengan prinsip bebas aktif, yang merupakan landasan utama dalam hubungan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam memperkuat peran negara dalam hubungan internasional dengan menggunakan pendekatan kualitatif historis. Penelitian ini menggali prinsip-prinsip bebas aktif, yang merupakan landasan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini mengungkap bagaimana prinsip bebas aktif memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia melalui analisis dokumen historis dan wawancara mendalam dengan Bapak Laode Muhamad Fathun, S.IP., M.HI. dan Bapak Hartanto Widjojo, S.IP., MA, CIQaR, seorang peneliti berkualitas internasional, menjaga stabilitas regional, dan berkontribusi pada perdamaian global. Hasil dari penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip bebas aktif dalam membentuk identitas dan peran Indonesia dalam kancah hubungan internasional, serta perlunya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan kebijakan politik luar negeri Indonesia.</i>
Revised:	13 Oktober 2024	
Accepted:	29 Oktober 2024	
Keywords: Kebijakan, Politik, Prinsip.		
(*) Corresponding Author: 12310611201@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 2310611215@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 32310611221@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 42310611222@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 52310611230@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 62310611234@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 72310611235@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 82310611448@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 92310611448@mahasiswa.upnvj.ac.id ; 102310611456@mahasiswa.upnvj.ac.id ;		

How to Cite: Trianjani, S., Yuman, D., Kamila, A., Negara, Y., Junaedi, S., Fasya, F., & Canthiqa, K. (2025). Evaluasi Keberhasilan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Memperkuat Peran Negara Dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.C), 233-247. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9705>

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip dasar yang akan mengarahkan politik luar negeri Bahasa Indonesia. Negara ini percaya bahwa setiap negara berhak atas kemerdekaan, dan penjajahan harus dihapus karena melanggar kemanusiaan dan keadilan. Indonesia juga ingin menjadi bagian dari ketertiban dunia yang didasarkan pada keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian yang berkelanjutan. Politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai politik luar negeri bebas-aktif didasarkan pada prinsip-prinsip ini. Dengan mengatakan "bebas", Indonesia menunjukkan bahwa negara itu memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri tentang masalah global tanpa bergantung pada koalisi militer atau blok politik tertentu. Namun, kata "aktif" menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial di tingkat global.

Metode bebas-aktif membentuk dasar politik internasional Indonesia. Prinsip-prinsip ini diterapkan oleh para pemimpin Indonesia dengan menyesuaikannya dengan kondisi sistem internasional yang ada saat ini. Banyak studi telah dilakukan tentang politik internasional Indonesia.

Penelitian terbaru oleh Syamsul Hadi tentang politik luar negeri Indonesia mengamati respons Indonesia terhadap naiknya pengaruh Tiongkok, dalam hal keamanan dan ekonomi. Kehadiran Tiongkok di bidang keamanan telah mendorong negara-negara di luar wilayah tersebut, termasuk Amerika Serikat, untuk mengambil peran sebagai penyeimbang. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika regional antara Indonesia, Tiongkok, dan kekuatan global lainnya tengah mengalami perubahan signifikan, yang berdampak pada strategi politik luar negeri Indonesia. (Hadi, 2012).

Menurut penelitian Evan A. Laksmana, dua faktor yang memengaruhi profil politik Indonesia di luar negeri adalah lokasi geografis dan jumlah penduduknya. Laksmana juga menekankan bahwa norma dan moral secara konsisten membentuk kebijakan internasional Indonesia. termanifestasi dalam partisipasinya di ASEAN dan forum-forum global lainnya. Sejak proses demokratisasi mulai berlangsung sejak 1998, Indonesia telah memperoleh pengakuan lebih luas di panggung internasional, dianggap sebagai kekuatan “soft power”. Menurut Laksmana (2011), lokasi geografis Indonesia yang strategis dan populasi yang besar dapat menjadi sumber ancaman jika pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pertahanan..

Paige Johnson Tan juga melakukan penelitian yang mengacu pada sejarah dalam artikelnya tahun 2007 *Navigating a Turbulent Ocean: Indonesias Worldview and Foreign Policy in Asian Perspectives* Penelitian ini membahas definisi Indonesia, sejarahnya, dan posisinya dalam hubungan internasional. Indonesia memiliki posisi pemimpin di wilayah ini karena wilayahnya yang luas, sejarah dan budayanya yang kaya, lokasinya yang strategis, dan kekuatan politiknya di luar negeri. Dalam artikel ini, kami berbicara tentang bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif memperkuat peran negara dalam hubungan internasional.

Namun, penelitian ini belum menggunakan teori peran yang definitif; teori ini dianggap sesuai untuk menjadi kerangka yang efektif untuk menganalisis perilaku negara-negara dunia ketiga dan negara berkembang. Hingga kini, para peneliti lebih sering menggunakan analisis dari perspektif negara-negara kuat, karena mereka percaya bahwa keputusan yang dibuat oleh negara-negara kuat memiliki dampak yang signifikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Peran

Teori peran sering digunakan untuk menilai kebijakan luar negeri karena dua alasan utama. Pertama, teori ini memberikan wawasan tentang perilaku kelompok yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, karena fokus teori ini pada pemahaman harapan para pembuat kebijakan tentang peran mereka, aplikasinya dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan sistem politik yang lebih luas, yaitu sistem internasional. Namun, ide dasar teori peran mengaitkan perilaku seseorang pada berbagai tingkatan analisis. Individu, kelompok, organisasi, negara, komunitas, dan organisasi internasional dan supranasional merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung. Bagaimana komponen-komponen ini berfungsi dalam sistem yang lebih luas disebut dengan istilah "peran" (Walker, 2013:10).

K.J. Holsti pertama kali membangun teori peran dalam studi hubungan internasional (HI) dalam tulisannya yang berjudul "Persepsi Peranan Nasional dalam Studi Politik Luar Negeri" pada tahun 1970. Ide ini muncul karena kecenderungan para peneliti HI untuk menggambarkan perilaku suatu negara. Saat itu, menurut Holsti, para peneliti cenderung mengidentifikasi negara berdasarkan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, Beberapa negara disebut sebagai anggota Blok Barat, Blok Timur, atau Non-Blok. Di dalam blok-blok ini, negara-negara biasanya dianggap sebagai pemimpin, penyeimbang, atau hanya sebagai negara pinggiran atau pengikut.

Bagaimana pembaca melihat negara luar dalam sistem internasional dipengaruhi oleh klasifikasi negara-negara ini. Dengan membagi negara dalam kategori tertentu, kita dapat memahami bagaimana kebijakan internasional mereka menanggapi perubahan kondisi. Misalnya, jika sebuah negara dikategorikan sebagai negara penengah, kita bisa membayangkan bahwa negara tersebut akan bertindak sebagai mediator dalam konflik atau perselisihan antarnegara. Negara yang berperan sebagai penyeimbang tidak akan memihak salah satu blok yang berselisih.

Menurut Holsti, klasifikasi yang umum pada saat itu hanya mencakup perilaku negara-negara besar. Kategorisasi seperti Blok Barat atau Blok Timur dan menganggap negara lain sebagai netral dianggap terlalu sederhana. Sejauh negara-negara kecil di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin tidak terlibat secara eksplisit dalam konflik Perang Dingin, pendekatan ini tidak dapat melihat kompleksitas perilaku mereka. Holsti menekankan bahwa klasifikasi tersebut mengabaikan keragaman dan dinamika unik yang ada di negara-negara kecil tersebut.

Dalam usahanya untuk memahami berbagai peran yang dimainkan oleh negara dalam sistem internasional, Holsti melakukan sejumlah penelitian dan menemukan bahwa persepsi tentang peran nasional, status negara, serta tuntutan dan harapan dari negara lain memengaruhi perilaku suatu negara. Holsti mengembangkan tiga konsep peran utama: Persepsi Peran Nasional.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

Prinsip bebas-aktif digunakan dalam politik luar negeri Indonesia. Prinsip ini menggambarkan bagaimana Kebijakan luar negeri Indonesia tidak terikat pada ideologi atau aliansi dengan negara lain, tetapi tetap aktif dalam membangun hubungan persahabatan dan kerja sama internasional. Politik bebas-aktif mengacu pada konsep "bebas", yang berarti bahwa Indonesia tidak terlibat dalam konflik antarnegara dan secara aktif berusaha mencapai tujuan di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan global. Dengan menerapkan prinsip ini, Indonesia memiliki kemampuan untuk berperan secara signifikan dalam politik internasional tanpa terikat pada blok tertentu, yang memungkinkannya berinteraksi dengan berbagai negara.

Dasar konstitusi dari politik luar negeri Indonesia terletak pada UUD 1945, yang memperjelas arah kebijakan luar negeri negara ini. Di sisi lain, landasan idiilnya adalah Pancasila, yang memberikan prinsip-prinsip moral dan filosofis dalam mengatur hubungan luar negeri Indonesia. Adapun implementasinya berubah sesuai dengan periode pemerintahan, menyesuaikan dengan dinamika dan kepentingan nasional yang sedang berlangsung.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:

1. Dua Benua dan Dua Samudra: Karena lokasi geografis Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra, niat untuk menjadi jembatan yang menghubungkan daripada memisahkan. Indonesia tidak ingin terjebak dalam konflik, tetapi ingin membantu perdamaian dan kerjasama.
2. Luka Sejarah dan Cita-cita Kemerdekaan: Bangsa Indonesia yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan memiliki tekad kuat untuk menjaga kemerdekaannya. Politik bebas aktif menjadi alat untuk menghindari keterlibatan dalam blok-blok kekuatan yang berpotensi mengancam kedaulatan.
3. Kepentingan Nasional dan Keseimbangan Global: Indonesia memahami bahwa kepentingan nasionalnya tidak terlepas dari situasi global. Politik bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, tanpa terikat pada kepentingan negara lain.
4. Dunia Pasca Perang Dunia II: Mencari Jalan Damai: Lahirnya politik bebas aktif diwarnai situasi internasional yang penuh gejolak pasca Perang Dunia II. Indonesia, sebagai negara muda, memilih jalan damai dan netralitas untuk menghindari terjebak dalam pusaran konflik global.
5. Keadilan dan Kepercayaan di Panggung Dunia: Pemerintah Indonesia yang bersih dan adil, dengan sikap politik yang tidak memihak, diharapkan mampu membangun kepercayaan di mata dunia internasional. Kepercayaan ini menjadi modal penting untuk memajukan bangsa dan mencapai cita-cita bersama.

Hubungan Internasional

Dalam konteks ini, penelitian hubungan internasional mencakup berbagai bidang studi, termasuk ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, dan lain-lain, yang mempelajari masalah sosial yang terkait. Karena negara tidak dapat eksis secara mandiri dan terisolasi dari kerja sama internasional, keterlibatan mereka dalam hubungan internasional sekarang menjadi sangat penting.

Secara umum, lingkup hubungan internasional mencakup semua jenis komunikasi antara orang dan negara. Karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya secara mandiri, mencapainya melalui kerja sama internasional akan menjadi tidak mungkin dalam era globalisasi saat ini.

Secara fundamental, hubungan internasional mencakup semua jenis hubungan, baik antara individu maupun organisasi politik sebagai bagian dari struktur internasional. Ini mengacu pada proses komunikasi yang lama dan terorganisir antara entitas di seluruh dunia, baik yang terikat atau merdeka.

Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Haryanto (2015) berjudul "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran" menunjukkan bahwa sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengadopsi prinsip bebas aktif sebagai salah satu landasan kebijakan luar negerinya. Konsepsi peran Indonesia berakar pada prinsip ini. Dari era Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah Indonesia secara aktif menerapkan prinsip bebas aktif, dengan mempertimbangkan persyaratan peran dari negara-negara lain. Secara keseluruhan, prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi tindakan politik luar negeri Indonesia.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Dwi dkk. (2023), "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia untuk Perdamaian Dunia", menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas jelas merupakan strategi politik global yang digunakan oleh negara tersebut. Setiap periode pemerintahan harus menetapkan dasar agar prinsip bebas aktif ini dapat diterapkan dalam politik internasional Indonesia. Kepentingan nasional

mendorong perubahan politik luar negeri Indonesia. Kepentingan nasional tidak memengaruhi perumusan politik luar negeri suatu Negara.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Sadewa & Hakiki (2023) berjudul "Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok" menunjukkan bahwa prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia muncul sebagai hasil dari konflik antara dua kubu tentang siapa yang harus memilih antara Barat dan Timur. Indonesia menjunjung tinggi perdamaian, menentang penjajahan, dan mendukung kerja sama internasional yang bebas dan aktif. Salah satu upaya Indonesia untuk mendorong perdamaian global adalah GNB.

Peneliti percaya bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguatkan penelitian sebelumnya. Salah satu contoh penelitian tersebut adalah tentang bagaimana kebijakan politik internasional Indonesia yang bebas dan aktif meningkatkan peran negara dalam hubungan internasional. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian sebelumnya dan membuat kemajuan baru dalam memerangi korupsi.

Kerangka Berpikir

Sejak Indonesia menjadi negara merdeka, prinsip bebas telah digunakan secara aktif sebagai dasar kebijakan luar negerinya. Ide ini masih relevan dan sering menjadi dasar evaluasi kebijakan luar negeri Indonesia.

Konsep peran nasional dan role prescription, atau harapan peran dari lingkungan internasional, menurut Holti adalah sumber utama pembentukan kebijakan luar negeri. Konsep peran nasional dapat dipengaruhi oleh ideologi atau dasar politik suatu negara di luar negeri, yang dapat dilihat dalam undang-undang atau peraturan negara tersebut. Kepentingan nasional juga dapat membentuk konsepsi peran nasional. Namun, negara tetangga, situasi internasional, dan peraturan dan hukum internasional membentuk persepsi peran.

Dalam konteks politik luar negeri Indonesia, teori ini mengindikasikan bahwa konsepsi peran, seperti prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional, menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia. Di sisi lain, harapan peran bagi Indonesia timbul dari dinamika lingkungan internasional yang berubah seiring pergantian pemerintahan. Kebijakan luar negeri Indonesia merupakan kombinasi dari kedua aspek ini.

Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Untuk mengembangkan dan menguji teori, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif historis yang mengintegrasikan elemen kualitatif dan kadang-kadang kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan dokumen historis atau interpretasi sejarawan. Terlepas dari fakta bahwa istilah "kualitatif historis" bukan istilah baru dalam bidang studi hubungan internasional, pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian kualitatif telah lama menjadi bagian dari tradisi akademik dalam bidang ini.

Karya sejarah yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kerangka teoritis yang dipilih. Sejarah digunakan dalam penelitian hubungan internasional sebagai data primer. Data primer adalah informasi yang disajikan tanpa interpretasi tambahan, sehingga para peneliti dapat menerima secara luas pernyataan atau kejadian tersebut.

Pertama, sumber dievaluasi. Penelitian ini menggunakan dokumen resmi negara, pendapat dan komentar dari pelaku diplomasi, perspektif para ahli, dan dokumen cetak dan elektronik dari non-pemerintah. Kedua, cari tahu sumber utama. Sumber utama dapat diidentifikasi sebagai informan yang memahami sejarah politik luar negeri Indonesia. Ketiga, identifikasi sumber sekunder. Sumber sekunder terdiri dari dokumen elektronik dan cetak yang digunakan untuk mengonfirmasi atau mendukung data dari sumber utama.

Penelitian ini membandingkan data dari berbagai sumber dan menggunakan bukti dari sumber-sumber tersebut untuk mendukung dan menyusun tema-tema secara konsisten untuk memvalidasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut terdapat hasil wawancara mendalam kepada informan.

Tabel 1. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana implementasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif dapat mempengaruhi persepsi global terhadap reputasi sebuah negara dan, akhirnya, memperkuat peran diplomatis dan ekonominya?	Implementasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang telah berlangsung sejak era Bung Karno hingga sekarang, menunjukkan upaya Indonesia untuk menjadi negara yang independen dan tidak memihak pada blok manapun. Kebijakan ini memungkinkan Indonesia menciptakan jejaring kemitraan global yang luas dan meningkatkan peran diplomatiknya secara signifikan. Sebagai mediator dalam konflik internasional dan peserta aktif dalam misi perdamaian PBB, Indonesia memperkuat reputasinya sebagai pendukung perdamaian dunia dan penentang kolonialisme. Dengan fleksibilitas dalam hubungan internasional, kebijakan ini membantu Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia dan mempermudah pencapaian cita-cita nasional sesuai dengan konstitusi negara.
2.	Bagaimana sebuah negara dapat menggunakan diplomasi multilateral sebagai bagian dari strategi politik luar negeri bebas aktif untuk memperkuat peran mereka dalam arena internasional?	Diplomasi multilateral merupakan komponen penting dalam strategi politik luar negeri bebas aktif Indonesia, memungkinkan negara ini meningkatkan visibilitas dan pengaruhnya di arena internasional. Melalui partisipasi dalam forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan G20, Indonesia dapat menyuarakan

		<p>kepentingan nasional, membangun kerja sama internasional, serta menjadi mediator dan fasilitator dalam berbagai isu global. Diplomasi ini juga membantu melindungi hak dan kepentingan warga negara, serta mengatasi masalah global seperti perubahan iklim dan terorisme. Dengan terlibat aktif dalam diplomasi multilateral, Indonesia memperkuat perannya di kancah internasional dan memastikan bahwa kepentingan nasionalnya terdengar dan terlindungi dalam pergaulan global.</p>
3.	<p>Dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, bagaimana sebuah negara dapat membangun dan memperkuat aliansi strategis untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya dalam kancah global?</p>	<p>Dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, sebuah negara dapat membangun dan memperkuat aliansi strategis untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan beberapa langkah kunci. Pertama, identifikasi kepentingan bersama dengan negara mitra untuk memastikan kesamaan tujuan dalam politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Kedua, membangun kepercayaan melalui kunjungan bilateral dan dialog yang sering untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati. Ketiga, mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, mirip dengan konsep simbiosis mutualisme dalam biologi, di mana kedua belah pihak memperoleh manfaat. Keempat, aktif dalam mekanisme multilateral seperti PBB, ASEAN, atau G20 untuk memperluas jaringan aliansi dan memperkuat posisi internasional. Terakhir, fleksibilitas dan keterbukaan dalam berinteraksi dengan negara lain sangat penting untuk memastikan aliansi strategis dapat terbentuk dan bertahan. Contoh nyata dari aliansi strategis ini adalah hubungan Indonesia dengan Jepang melalui JICA, serta kerja sama dengan Korea Selatan dan Tiongkok.</p>
4.	<p>Bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dalam memperkuat</p>	<p>Faktor internal dan eksternal memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif suatu negara dalam memperkuat peran mereka di arena internasional. Secara internal, stabilitas</p>

	<p>peran suatu negara dalam hubungan internasional?</p>	<p>politik, kualitas kepemimpinan, kekuatan ekonomi, dan kesatuan masyarakat merupakan faktor penentu. Stabilitas politik yang baik mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan luar negeri, sementara kepemimpinan yang visioner dan berwibawa dapat meningkatkan reputasi dan pengaruh negara di kancah global. Kekuatan ekonomi memungkinkan negara untuk mendukung kebijakan luar negeri dengan sumber daya yang memadai, serta memberikan insentif kepada negara lain untuk bekerja sama. Kesatuan masyarakat juga memperkuat posisi negara dalam pergaulan internasional. Dari segi eksternal, kondisi geopolitik regional dan dinamika global turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan luar negeri suatu negara. Stabilitas regional menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri, sementara dinamika global yang cepat berubah mengharuskan negara untuk responsif dan adaptif terhadap perkembangan terkini. Hubungan bilateral dengan negara lain juga menjadi faktor penting dalam membentuk aliansi strategis dan mendukung kepentingan nasional. Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dapat diukur melalui indikator seperti peningkatan reputasi dan pengaruh negara di forum internasional, terciptanya aliansi strategis yang saling menguntungkan, serta kemampuan negara untuk menjaga kepentingan nasionalnya dalam dinamika geopolitik global.</p>
<p>5.</p>	<p>Apa saja metrik yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan politik luar negeri bebas aktif yang berkontribusi pada peningkatan posisi Indonesia di hubungan internasional?</p>	<p>Indikator keberhasilan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam memperkuat perannya di hubungan internasional dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, dari segi politik, peningkatan pengaruh Indonesia di dunia dan di kawasan, seperti masuknya Indonesia dalam G20 dan citra positif Indonesia di kancah internasional, menjadi indikator keberhasilan. Kedua, dari dimensi ekonomi, peningkatan</p>

		<p>pertumbuhan ekonomi, volume perdagangan, dan kerja sama ekonomi yang lebih luas dapat menjadi penanda keberhasilan kebijakan luar negeri. Ketiga, dari segi sosial budaya, minat orang asing untuk berkunjung ke Indonesia, peningkatan nilai-nilai demokrasi dan toleransi, serta peran Indonesia dalam organisasi regional seperti ASEAN, mencerminkan keberhasilan kebijakan luar negeri bebas aktif. Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan luar negeri dapat dinilai dari peningkatan pengaruh politik, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan peningkatan minat serta pengakuan terhadap aspek sosial budaya Indonesia di kancah internasional.</p>
6.	<p>Tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global?</p>	<p>Tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global sangat kompleks. Pertama, isu global yang kompleks seperti konflik di Israel dan Palestina, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, transisi energi, dan infrastruktur, menjadi tantangan utama. Penentuan prioritas dalam menghadapi isu-isu tersebut menjadi krusial. Kedua, persaingan global antara negara-negara besar seperti Amerika dan Cina mengharuskan Indonesia untuk merespons dengan strategi yang tepat, terutama dalam menjaga kedaulatan dan sumber daya alam. Ketiga, perkembangan geopolitik kontemporer seperti klaim Cina di Laut Cina Selatan, persaingan antara Cina, Jepang, dan Korea, serta aliansi AUKUS, menimbulkan tantangan baru dalam menjaga stabilitas regional dan kedaulatan nasional. Keempat, sumber daya ekonomi dan dukungan masyarakat domestik juga menjadi hambatan, dimana stabilitas ekonomi dan dukungan publik sangat penting untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian isu-isu global, merespons</p>

		persaingan global dengan strategi yang tepat, menjaga kedaulatan dan sumber daya alam, serta memperkuat stabilitas ekonomi dan dukungan masyarakat domestik.
7.	Apa dampak dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif terhadap stabilitas regional dan perdamaian global, serta bagaimana hal ini mempengaruhi peran negara dalam dinamika hubungan internasional?	Dampak dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif terhadap stabilitas regional dan perdamaian global cenderung positif. Indonesia dapat mempromosikan dialog, kerja sama, dan toleransi melalui peran mediator dan pemangku kepentingan regional maupun global. Nilai-nilai budaya yang toleran juga turut dipromosikan, meningkatkan kerukunan di tingkat global. Namun, ada potensi tantangan dalam menjaga konsistensi kebijakan ini. Konsistensi politik luar negeri menjadi krusial dalam menghadapi isu-isu kompleks global. Meskipun demikian, secara keseluruhan, dampak positif lebih dominan, dengan Indonesia terus berperan sebagai fasilitator dan mediator, menjaga citra positif, dan berkontribusi pada stabilitas regional dan perdamaian global. Untuk masa depan, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya, meningkatkan sumber daya manusia dan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung kebijakan bebas aktif di luar negeri.

Pembahasan

Untuk menjaga kepentingan nasional, pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan luar negeri yang liberal dan aktif (Mila et al., 2020). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mendukung kebijakan tersebut. Didasarkan pada konstitusi, khususnya alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 11 UUD 1945, penyelenggaraan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dijamin. penting bagi kelangsungan politik internasional Indonesia. Dalam kebijakan luar negerinya yang liberal dan aktif, Indonesia berpartisipasi dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan bergabung dengan negara-negara Asia dan Afrika lainnya untuk membentuk Gerakan Non-Blok. Konsep kebebasan yang positif ini menjadi dasar kebijakan internasional pemerintah Indonesia. Prinsip-prinsip ini diterapkan oleh para pemimpin Indonesia dengan mengadaptasinya dengan Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kendali penuh atas kebijakan luar negerinya sambil tetap aktif berpartisipasi dalam berbagai forum dan organisasi internasional untuk mendukung kepentingan nasional. Sejak kemerdekaan, prinsip ini telah menjadi dasar diplomasi Indonesia. Prinsip Bebas Aktif menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam koalisi kekuatan besar dunia dan akan aktif

berkontribusi pada perdamaian dunia. Kebijakan ini telah berubah seiring perkembangan politik global dan kepentingan nasional Indonesia. Banyak indikator penting yang menunjukkan peran yang lebih besar Indonesia di dunia internasional menunjukkan keberhasilan kebijakan ini.

Indonesia adalah anggota aktif berbagai organisasi internasional. Dengan menjadi anggota mereka, Indonesia memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada masalah global seperti perdamaian, keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan iklim. Sebagai contoh, statusnya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB memungkinkan Indonesia untuk berkontribusi pada masalah-masalah ini.

Indonesia juga telah berkontribusi pada masalah global seperti krisis kemanusiaan, penanggulangan terorisme, dan perubahan iklim. Sebagai contoh, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali pada tahun 2007, yang menjadi peristiwa penting dalam perjuangan global untuk mengatasi masalah iklim. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB menunjukkan komitmen negara tersebut untuk membantu menjaga perdamaian di seluruh dunia. Secara keseluruhan, Indonesia telah memperkuat posisinya dalam hubungan internasional berkat kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung perdamaian dan kesejahteraan dunia melalui diplomasi ekonomi yang kuat, peran dalam menjaga perdamaian regional, keterlibatan dalam masalah global, dan pengembangan soft power.

Implementasi Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Indonesia dapat memperkuat reputasinya sebagai pendukung perdamaian dan penentang kolonialisme di seluruh dunia dengan menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dengan melakukan ini, negara tersebut dapat membangun jaringan kemitraan global yang luas, meningkatkan peran diplomatiknya, dan memperkuat reputasinya sebagai pendukung perdamaian di seluruh dunia. Selain itu, negara tersebut dapat berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB dan membangun kerja sama internasional yang kuat.

Selain itu, kebijakan politik bebas yang aktif di luar negeri memungkinkan Indonesia untuk memperkuat posisi ekonominya melalui kerja sama ekonomi dengan negara lain dan meningkatkan pasar ekspornya. Dengan cara ini, Indonesia dapat meningkatkan kehadirannya dan pengaruhnya di tingkat internasional serta memastikan bahwa kepentingannya didengar dan dilindungi di seluruh dunia.

Ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan luar negeri yang responsif dan proaktif dalam menghadapi perubahan dinamika hubungan internasional untuk mencapai tujuan nasional dan global yang lebih luas. Indonesia telah mendapatkan banyak manfaat dari penerapan kebijakan luar negeri bebas aktif, yang telah memperkuat citra globalnya, meningkatkan kekuatan diplomatik dan ekonominya, dan mendukung perdamaian global.

Peran Diplomatis dan Ekonomi

Menurut Chaerunnisa (2023), diplomasi ekonomi terutama berfokus pada diplomasi komersial, yang meliputi diplomasi perdagangan dan keuangan. Secara teori, studi mengenai diplomasi komersial menekankan pada jaringan pemerintahan yang kompleks yang mencakup Kementerian Perdagangan, Keuangan, dan Luar Negeri, dengan tujuan meningkatkan perdagangan, investasi, dan kepentingan bisnis melalui pembentukan jaringan bisnis dan diplomatik di misi luar negeri. Dalam program penugasan, kelompok bisnis yang dipekerjakan secara resmi dalam misi dan konsulat di luar negeri juga memiliki peran penting dalam jaringan ini. Strange (1992) menyatakan

bahwa perusahaan asing sering berperan sebagai diplomat, terutama di sektor keuangan dan industri di negara tertentu, dan juga dianggap sebagai instrumen kebijakan negara.

Dengan demikian, negara-negara yang menginginkan stabilitas keuangan di tingkat nasional maupun global berkonsentrasi pada diplomasi finansial. Negara menjadi bagian penting dari diplomasi keuangan dalam inisiatif G7, G8, IMF, dan Bank Dunia. Konsep diplomasi finansial tumbuh bersamaan dengan krisis keuangan yang terus-menerus, menurut banyak penelitian. Kelompok ekonomi G20 menggabungkan ekonomi negara maju dan berkembang. Rezki (2023) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan level produksi akan didorong oleh integrasi ekonomi negara berkembang terhadap perekonomian global.

Sebagian besar orang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagian besar ekonom Amerika dan komentator lainnya berpendapat bahwa globalisasi akan meningkatkan penerimaan demokrasi politik dan individualisme di seluruh dunia, dan bahwa negara-negara berkembang akan mengadopsi model ekonomi berbasis pasar Amerika. Untuk Indonesia, menjadi anggota G20 memiliki banyak keuntungan strategis. G20 adalah organisasi yang berfokus pada masalah ekonomi, terutama perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Karena itu, Indonesia diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur (Azmi dan Bintang, 2024).

Faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif

Sadewa dan Hakiki (2023) menyatakan bahwa ada banyak elemen internal yang memengaruhi keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Ideologi, nilai, dan ideologi liberal sangat memengaruhi kebijakan internasional. Sebagai contoh, Presiden Partai Demokrat AS Joe Biden dikenal karena keyakinannya yang berpusat pada prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kebijakan internasional juga dipengaruhi oleh komponen kognitif, seperti kesadaran politik tentang fenomena internasional. Presiden Amerika Serikat sangat memahami masalah global yang memengaruhi kebijakannya di luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh hubungan masyarakat-negara, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Amal (2021) menyatakan bahwa elemen eksternal yang memengaruhi kesuksesan kebijakan politik luar negeri bebas aktif terdiri dari sejumlah elemen. Kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan negara lain. Sebagai contoh, dinamika hubungan bilateral dan kondisi global saat itu sangat memengaruhi kebijakan luar negeri AS. Keanggotaan PBB dan organisasi internasional lainnya memiliki dampak besar terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Keputusan yang dibuat oleh Indonesia di sidang Majelis Umum PBB adalah contoh nyata bagaimana faktor-faktor luar memengaruhi kebijakan luar negerinya. Selain itu, faktor eksternal, seperti peristiwa politik dan ekonomi, sangat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor eksternal ini termasuk berbagai peristiwa di seluruh dunia yang berdampak langsung pada kebijakan luar negeri suatu negara.

Setiawan (2020) menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Joko Widodo dikritik karena berfokus pada masalah domestik daripada hubungan internasional. Namun, perspektif lain menunjukkan bahwa masa kepemimpinan Jokowi mencurahkan perhatian besar pada dua masalah utama: poros maritim global dan diplomasi ekonomi. Sebenarnya, gagasan Holsti bahwa meningkatkan kesejahteraan adalah tujuan politik luar negeri mencerminkan pendekatan politik luar negeri Indonesia yang menekankan

perlindungan penduduknya. Kerjasama internasional juga diarahkan untuk menguntungkan warga negara Indonesia melalui alat diplomasi.

Indikator keberhasilan politik luar negeri bebas aktif dalam memperkuat peran Indonesia di hubungan internasional

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia menunjukkan beberapa tanda keberhasilan yang dapat diamati dari beberapa aspek (Wangke, 2021). Pertama, dalam segi politik, peningkatan pengaruh Indonesia di tingkat global dan regional, seperti keanggotaannya dalam G20 dan reputasi positif Indonesia di dunia internasional, menjadi indikator keberhasilan. Kedua, dari segi ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, volume perdagangan, dan ekspansi kerja sama ekonomi yang lebih luas menunjukkan efektivitas kebijakan luar negeri. Ketiga, dalam dimensi sosial-budaya, meningkatnya minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia, kemajuan dalam nilai-nilai demokrasi dan toleransi, serta peran yang aktif dalam organisasi regional seperti ASEAN, mencerminkan keberhasilan dari pendekatan politik luar negeri bebas aktif.

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur adalah fokus utama dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Kemampuan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama dengan negara lain menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil. Indonesia harus terlibat secara aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN dan G20 sebagai bagian dari hubungan internasional (Irewati dan Kartini, 2020). Keterlibatan ini dapat diukur dari seberapa baik Indonesia memanfaatkan peranannya dalam organisasi-organisasi tersebut dan meningkatkan kekuatan globalnya.

Diplomasi yang inventif, proaktif, dan antisipasi harus menjadi strategi politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Kemampuan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dan isu-isu internasional secara efektif dan adil juga penting; kemampuan Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri secara bebas dan jelas juga penting. Keberhasilan kebijakan luar negeri juga dapat diukur dari kemampuan Indonesia untuk menjelaskan serta memastikan tujuan dan prinsip yang mendasari kebijakannya.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global

Dalam konteks dinamika geopolitik global saat ini, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan saat menjalankan politik luar negeri secara mandiri (Amanda et al., 2023). Variasi pemahaman dan kepentingan di dalam negeri merupakan masalah utama. Salah satu tantangan pertama yang dihadapi Indonesia, menurut Rizal Affandi Lukman, Sherpa G20 Indonesia, adalah keanekaragaman pemahaman di dalam negeri yang harus diwakili di forum G20. Hal ini berdampak pada kemampuan Indonesia untuk menghadapi KTT G20 dan berpartisipasi aktif dalam forum internasional.

Indonesia juga menghadapi masalah lain, yaitu era perdagangan bebas yang semakin meningkat. Ini adalah situasi di mana proteksionisme perdagangan oleh negara mitra dapat memengaruhi pergerakan barang dan jasa. Indonesia harus menyesuaikan diri dengan dinamika perdagangan bebas, yang berdampak pada perdagangan domestik. Hutomo et al. (2023) menyatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan diplomasi antarnegara yang lebih bebas dan aktif serta berpartisipasi secara aktif dalam organisasi internasional untuk meningkatkan keamanan nasional dan stabilitas global untuk mengatasi tantangan ini.

Selain itu, Indonesia menghadapi masalah birokrasi, kebijakan pemerintah, dan proses pembangunan saat melakukan politik luar negeri secara bebas. Ahmad (2020) menyatakan bahwa globalisasi memiliki efek positif dan negatif pada politik, dan

Indonesia harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan keterlibatan global dalam perdamaian dengan menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas.

Dampak dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif

Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan pada kebijakan politik internasionalnya yang bebas aktif. Hutabarat (2022) menyatakan bahwa kebijakan ini memungkinkan Indonesia untuk berhati-hati dari urusan dalam negeri negara lain. Ini memungkinkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada pertumbuhan internalnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan negara lain. Kedua, kebijakan ini memungkinkan Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai bangsa Indonesia, seperti Pancasila, dalam kebijakan luar negeri, sehingga Indonesia dapat mempertahankan identitas nasionalnya dan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan dunia.

Kebebasan diplomasi global meningkat sebagai akibat tambahan dari kebijakan politik internasional bebas aktif Indonesia (Khoiriyah, 2022). Dengan kebijakan ini, Indonesia dapat membuat keputusan dan berkolaborasi dengan negara lain tanpa terbatas oleh kepentingan nasional (Wijayanti, 2022). Ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan perdamaian global dan meningkatkan keamanan negara.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif juga mempengaruhi partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional. Dengan kebijakan ini, Indonesia dapat berkontribusi pada stabilitas global dan keamanan nasional melalui partisipasi aktifnya dalam organisasi seperti PBB dan ASEAN. Oleh karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berkontribusi pada peningkatan keamanan nasional Indonesia.

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian terhadap keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dalam memperkuat peran Indonesia dalam hubungan internasional, dapat disimpulkan bahwa prinsip bebas aktif telah terbukti sukses dan memperkuat peran Indonesia di panggung internasional. Di samping itu, kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia juga memberikan sumbangan positif dalam memelihara stabilitas regional dan berfungsi sebagai mediator dalam konflik internasional. Dengan menerapkan kebijakan yang fleksibel, Indonesia mampu membangun jaringan kemitraan global yang luas dan meningkatkan pengaruh diplomatiknya secara signifikan.

Saran

Berdasarkan pandangan yang kami dapat melalui penelitian berikut, penting bagi Indonesia untuk terus mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai pendukung kebijakan luar negeri bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang selama ini telah membawa dampak positif bagi reputasi dan peran Indonesia dalam hubungan internasional, perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan konstitusi negara.

REFERENSI

Ahmad, A. (2020). Indo-Pacific Treaty Sebagai Perluasan Kerja Sama Indonesia Di Bidang Maritim Oleh: Putu Sukmadewi.

- Amal, M. A. (2021). *Persaingan Amerika Serikat–Rrt Kepada Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Politik Luar Negeri Bebas-Aktif (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin.*
- Amanda, M. D., Santoso, G., Puspita, A. M. I., & Imanda, F. A. (2023). Kontribusi Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional Indonesia di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6), 45-63.
- Azmi, A. N., & Bintang, R. (2024). Prinsip Bebas-Aktif Indonesia Pada Presidensi G20 Tahun 2022. *Emerald: Journal of Economics And Social Sciences*, 3(1), 41-50.
- Chaerunnisa, I. (2023). Implementasi Politik Bebas Aktif Pada Konflik Rusia dan Ukraina Guna Tercapainya Kepentingan Nasional Indonesia.
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia : Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, IV(II), 17–27.
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* e-ISSN, 2745, 5920.
- Hutomo, B. W., Widodo, P., Saragih, H. J. R., & Suwarno, P. (2023). Kontribusi Indonesia Dalam Isu Kawasan Indo-Pasifik Melalui Kebijakan Global Maritime Fulcrum. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 143-153.
- Irewati, A., & Kartini, I. (2020). *Potret politik luar negeri Indonesia di era reformasi.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khoiriyah, N. M., & Aidini, N. (2022). Pakta Keamanan Trilateral Aliansi Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (AUKUS) dalam Perspektif Neorealisme. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1(1), 68-77.
- Mila, N., Vida, F., & Adi, D. P. (2020). Sejarah Perkembangan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Pasca Reformasi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 73–100.
- Rizkia, N. D. (2023). Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Intelektual Sosial Hukum*, 1(1), 14-28.
- Sadewa, D. P., & Hakiki, F. (2023). Dinamika Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Melalui Gerakan Non-Blok (Gnb). *Jurnal Lemhannas Ri*, 11(1), 13-28.
- Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia COVID-19: Penyelamatan dan Kerjasama. *Independen, Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2).
- Wangke, H. (2021). *Diplomasi digital dan kebijakan luar negeri Indonesia.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kyberology: Journal of Government Studies*, 2(2), 70-95.